

IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN BERAS DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BATANG

Duta Carisma Danna¹⁾, Hartuti Purnaweni, dan Mochammad Mustam

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email¹⁾ : dcrsm@gmail.com

ABSTRACT

Availability of good rice is expected to maintain food security. However, rice availability in Batang Regency decreases although the consumption of rice is always increases. When this occurs continuously, it is feared that there will be deficits that cause weak food security.

Location of the research was in Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Batang Regency. Selection of informants was done using a purposive sampling. To test the quality of the obtained data, technique of triangulation was employed.

As the focus of study, implementation of the policy observed through results and process, based on the policy performance of observable indicators of effectiveness, efficiency, fairness, adequacy, responsiveness and accuracy. Based on theories of Edwards III, and Van Meter & Van Horn's implementation model synthesis, acquired the factors that support and hinder the implementation of the policy, namely communications, disposition, bureaucratic structure and resources.

Based on the results of this research, implementation of the policy on the availability of rice on Batang has yet to pan out. There are still weakness in efficiency, fairness and effectiveness.

The recommendations are (1) addition of equitable distribution and infrastructures; (2) equity of efforts increased production; (3) equitable socialization and counseling services; (4) monitoring during the production process; and (5) intensive socialization and counseling.

Keyword : food security, implementation of policy, rice availability.

ABSTRAK

Ketersediaan beras yang baik diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan. Namun, ketersediaan beras di Kabupaten Batang justru cenderung menurun dan berbanding terbalik dengan konsumsi beras yang selalu meningkat. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus, maka dikhawatirkan akan terjadi defisit yang menyebabkan ketahanan pangan menjadi lemah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di BP2KP Kabupaten Batang. Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Untuk menguji kualitas data yang didapat, digunakan teknik triangulasi.

Sebagai fokus kajian, implementasi kebijakan diamati melalui proses dan hasil, yaitu berdasarkan kinerja kebijakan melalui indikator efektifitas, efisiensi, keadilan, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Berdasarkan sintesa model implementasi Edwards III dan Van Meter & Van Horn, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan ketersediaan beras di Kabupaten Batang belum berjalan dengan baik. Masih terdapat kekurangan pada efisiensi, keadilan dan efektifitas.

Rekomendasi yang diberikan yaitu (1) penambahan dan pemerataan sarana prasarana; (2) pemerataan usaha peningkatan produksi; (3) pemerataan pelayanan; (4) melakukan pengawasan selama proses produksi; (5) melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif.

Kata kunci : ketahanan pangan, implementasi kebijakan, ketersediaan beras.

1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia dan harus senantiasa tersedia cukup waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat. Penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 240 juta jiwa menyebabkan masalah pangan menjadi isu sensitif (BPS, 2010).

Kekurangan dan kerawanan pangan yang terjadi seringkali memicu konflik sosial. Hal tersebut diakibatkan permintaan pangan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penyediaannya (Kapindo, 2011: 21). Kompleksnya fenomena permasalahan yang dihadapi akan kebutuhan pangan di Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan isu sentral dan fokus yang harus diutamakan dalam pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan pada prinsipnya tercermin dari ketersediaan

pangan yang berasal dari hasil produksi dan selalu identik dengan komoditas beras. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa beras merupakan sumber utama bahan pokok makanan. Selain itu, beras merupakan komoditas yang menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan pertanian karena beras telah menjadi komoditas politik dan menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia (Sudirja, 2008: 1).

Ketersediaan beras yang cukup dengan jumlah dan mutu baik serta stabilitas harga diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Namun, ketersediaan beras di Kabupaten Batang selama 5 tahun cenderung menurun. Setelah mengalami kenaikan sebanyak 13.771 ton (6,84%) pada tahun 2010, ketersediaan beras mulai menurun sebanyak 27.671 ton (12,86%) pada tahun 2011 dan semakin menurun sebanyak 32.272 ton (17,21%) pada tahun 2012. Pada tahun 2013 juga kembali mengalami penurunan sebanyak 4.955 ton (3,19%). Data

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Ketersediaan Beras, Konsumsi Beras dan Surplus Ketersediaan Beras

Tahun	Produksi Padi (Ton)	Konsumsi Beras (Ton)
2009	201.457	47.212
2010	215.228	52.799
2011	187.557	59.825
2012	155.285	77.089
2013	150.330	79.122

Sumber: Batang Dalam Angka, 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa ketersediaan beras yang cenderung menurun tersebut berbanding terbalik dengan konsumsi beras di Kabupaten Batang yang selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 konsumsi beras mengalami peningkatan sebanyak 5.587 ton (11,83%) dan 7.026 ton (13,31%). Pada tahun 2012 dan tahun 2013 konsumsi beras semakin meningkat sebanyak 17.264 ton (28,86%) dan 2.033 ton (2,63%).

Apabila hal tersebut terjadi terus menerus, dikhawatirkan akan terjadi defisit ketersediaan beras yang mengakibatkan kekurangan pangan. Selama ini, surplus ketersediaan beras Kabupaten Batang sebagian besar diambil kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras. Tentunya, defisit ketersediaan beras tidak hanya mengancam Kabupaten Batang, akan tetapi juga mengancam kabupaten lain yang kekurangan pangan. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian ketersediaan beras yang berdampak terhadap lemahnya ketahanan pangan di

Kabupaten Batang. Oleh sebab itu, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi ketersediaan beras dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi ketersediaan beras dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Batang.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Kinerja Kebijakan

Kegagalan atau keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan dalam literatur studi implementasi, dikonsepsikan sebagai kinerja implementasi. Implementasi dilihat berdasarkan proses dan hasil, sehingga teori yang digunakan adalah kinerja kebijakan.

Kinerja implementasi menjadi bagian paling penting dalam studi implementasi. Pengetahuan tentang kinerja implementasi menjadi hal yang vital, sebab berdasarkan pengetahuan yang dimiliki akan membuat penilaian apakah implementasi suatu kebijakan boleh dikatakan berhasil atau gagal.

Kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, kelompok atau organisasi. Dengan demikian, kinerja merujuk pada keluaran, hasil atau pencapaian. Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja pada suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik berupa keluaran kebijakan, maupun hasil kebijakan.

Untuk dapat menentukan tinggi rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan, maka penilaian terhadap kinerja merupakan sesuatu yang

penting. Penilaian kinerja adalah penerapan metode yang dipakai untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi yaitu : (1) apa isi dan tujuan dari kebijakan; (2) apa tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut; dan (3) apakah setelah tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 98-100).

Untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, terdapat kriteria atau ukuran yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Secara umum, Dunn (2003: 610) menggambarkan kriteria penilaian kinerja publik yaitu (1) Efektifitas; (2) Efisiensi; (3) Kecukupan; (4) Keadilan; (5) Responsivitas; dan (6) Ketepatan. Dalam penelitian ini, fokus perhatian pengukuran kinerja kebijakan menggunakan kriteria di atas sebagai tolak ukur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu. Adapun situs penelitian ini dilakukan di BP2KP yang terletak di Kabupaten Batang, karena pelaksanaan ketersediaan beras hanya dilakukan oleh BP2KP.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Petani.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi, juga data sekunder yang bersumber dari data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data, kemudian data yang sudah dipilah disajikan dan pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan, dari kesimpulan yang kabur menjadi jelas (Prastowo, 2011: 230-232)

Kualitas atau keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan, melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan, dan mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

4. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, implementasi ketersediaan beras dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Batang dibahas dan dianalisis melalui 6 (enam) fenomena, yaitu (1) Ketepatan; (2) Responsivitas; (3) Efisiensi; (4) Keadilan; (5) Efektifitas; dan (6) Kecukupan.

4.1 Ketepatan

Pelaksanaan ketersediaan beras ditentukan oleh pengetahuan mengenai apa sebenarnya tujuan dari adanya ketersediaan beras. Pengetahuan yang benar mengenai tujuan akan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pada Pasal 2 ayat (1) PP

No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan telah dikemukakan tujuan dari adanya ketersediaan beras yaitu *“penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang berkembang dari waktu ke waktu”*.

Secara umum, pelaksana sudah mengetahui dan memahami tujuan dari ketersediaan beras yaitu untuk menyediakan beras kepada masyarakat guna mengurangi dan mencegah inflasi. Namun, untuk jawaban yang lebih tepat hanya dikemukakan oleh 3 (tiga) dari 9 (sembilan) informan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut merujuk pada tujuan ketersediaan beras yang tercantum dalam PP No. 68 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan dinilai lebih tepat.

Pengetahuan pelaksana yang kurang sempurna tersebut akan menimbulkan masalah baru apabila dalam pelaksanaan ketersediaan beras tidak disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Berbeda dengan pengetahuan pelaksana yang telah merujuk terhadap tujuan pelaksanaan ketersediaan beras akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumsi yang selalu naik agar dapat terpenuhi.

Pengetahuan pelaksana terhadap tujuan ketersediaan beras yang baik tersebut disebabkan oleh respon pelaksana berupa persetujuan terhadap isi kebijakan dan kognisi berupa kesamaan persepsi. Dalam pelaksanaan ketersediaan beras, keseluruhan pelaksana secara umum sudah setuju terhadap tujuan ketersediaan beras maupun isi kebijakan ketersediaan beras. Selain itu, dalam pelaksanaan ketersediaan beras sudah terdapat kesamaan persepsi antar pelaksana yang disebabkan oleh rantai komando dari atas ke bawah. Respons yang positif dan

kognisi yang baik tersebut, tentunya berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesediaan implementor yang baik juga dalam melaksanakan ketersediaan beras sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Respons dan kognisi yang baik tersebut mengindikasikan bahwa disposisi yang dimiliki pelaksana sudah baik. Pengetahuan implementor mengenai tujuan ketersediaan beras yang baik tersebut disebabkan oleh disposisi implementor yaitu respons implementor berupa persetujuan terhadap isi kebijakan dan kognisi implementor berupa pemahaman pelaksana.

Selain itu, manfaat yang dirasakan masyarakat sasaran terkait adanya pelaksanaan ketersediaan beras dinilai sudah baik. Hal ini diindikasikan oleh adanya sekolah lapang berupa SL PTT, SL PHT dan SRI yang dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran kebijakan. Tingkat perubahan kebiasaan masyarakat sasaran belum sepenuhnya baik. Adanya kendala dalam merubah pola pikir masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang rendah menjadikan tingkat perubahan kebiasaan di masyarakat belum baik. Manfaat baik yang dirasakan oleh masyarakat sasaran disebabkan oleh adanya transmisi, kejelasan dan kesadaran berupa dukungan yang dilakukan pelaksana. Tingkat perubahan kebiasaan masyarakat sasaran yang belum baik disebabkan oleh kurangnya kontinuitas komunikasi yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan ketersediaan beras, implementor sudah memberikan transmisi atau penyampaian informasi terhadap masyarakat sasaran terkait ketersediaan beras. Transmisi tersebut dilakukan secara langsung dengan tatap muka berupa kunjungan dan ceramah melalui media sosialisasi dan penyuluhan, sedangkan transmisi secara

tidak langsung dilakukan melalui media siaran radio. Selain itu, adanya praktek langsung yang diberikan oleh pelaksana terhadap masyarakat sasaran menjadikan komunikasi yang dilakukan tersebut jelas. Namun, untuk konsistensi komunikasi berupa rutinitas belum dilakukan secara rutin, hanya komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung melalui media radio sudah dilakukan dengan rutin yaitu satu minggu satu kali. Hal tersebut juga dinilai masih kurang intensif.

Transmisi dan kejelasan dalam pelaksanaan ketersediaan beras yang baik mengindikasikan bahwa komunikasi yang dilakukan sudah baik, sedangkan kesadaran berupa dukungan pelaksana mengindikasikan bahwa disposisi yang dilakukan sudah baik, namun perlu diperhatikan terkait dengan kontinuitas komunikasi. Manfaat yang dirasakan masyarakat sasaran tersebut disebabkan oleh komunikasi dan disposisi berupa transmisi, kejelasan dan dukungan pelaksana, sedangkan tingkat perubahan yang belum baik dikarenakan oleh kurangnya komunikasi berupa kontinuitas.

4.2 Responsivitas

Responsivitas merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada penerima layanan. Responsivitas yang baik diharapkan dapat menjadi cara yang efisien untuk pelaksanaan ketersediaan beras dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Batang.

Dalam pelaksanaan ketersediaan beras, responsivitas yang diberikan sudah baik. Adanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sasaran berupa sosialisasi dan penyuluhan merupakan salah satu responsivitas yang diberikan pelaksana terhadap penerima layanan. Responsivitas baik yang diberikan terhadap penerima

layanan disebabkan oleh adanya kesadaran implementor berupa dukungan pelaksana terhadap pelaksanaan ketersediaan beras.

Dalam pelaksanaan ketersediaan beras, terdapat dukungan implementor berupa pelayanan seperti sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pendampingan. Akan tetapi, dari hasil observasi yang dilakukan, responsivitas belum diberikan secara optimal dan maksimal. Hal ini didasarkan terhadap pelayanan yang tidak diberikan secara merata dan keseluruhan.

Kesadaran implementor yang baik tersebut mengindikasikan bahwa disposisi yang dimiliki pelaksana sudah baik. Jadi, responsivitas yang baik tersebut dipengaruhi oleh disposisi implementor berupa dukungan.

4.3 Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Efisiensi dalam pelaksanaan ketersediaan beras di Kabupaten Batang meliputi ketersediaan sarana prasarana dan usaha yang dilakukan. Ketersediaan sarana prasarana yang baik akan menentukan tercapainya suatu efisiensi.

Ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan ketersediaan beras masih kurang memadai dan tidak merata ke seluruh kelompok. Bila dibandingkan dengan lahan pertanian dan jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Batang tentu sangat tidak sesuai dan tidak ideal. Hal tersebut disebabkan oleh struktur birokrasi berupa kerjasama dan koordinasi maupun sumber daya berupa sumber daya dana.

Alokasi dana anggaran APBD yang sangat kecil dan ketersediaan sumber daya dana yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa APBN juga

belum mampu untuk menyediakan sarana prasarana sesuai dengan jumlah sasaran kebijakan. Kurangnya kerjasama terkait dengan pengadaan sarana prasarana menyebabkan ketersediaan sarana prasarana kurang mencukupi dan lemahnya koordinasi yang dilakukan selama ini menyebabkan ketidakmerataan sarana prasarana.

Sumber daya dana yang tidak baik tersebut mengindikasikan bahwa sumber daya yang ada belum baik. Selain itu, kurangnya kerjasama dan lemahnya koordinasi mengindikasikan bahwa struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ketersediaan sarana prasarana yang belum baik tersebut dipengaruhi oleh minimnya sumber daya berupa dana dan lemahnya struktur birokrasi berupa kerjasama dan koordinasi.

Usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan ketersediaan beras yaitu dengan sekolah lapang berupa SL PTT, SL PHT dan SRI. Akan tetapi dari hasil observasi, hal tersebut belum dilakukan secara maksimal yang diindikasikan oleh adanya sekolah lapangan yang tidak diberikan secara merata ke seluruh kelompok tani. Hal ini disebabkan oleh kesadaran berupa dukungan pelaksana, sedangkan usaha yang kurang efisien tersebut disebabkan oleh lemahnya sumber daya berupa manusia dan dana.

Adanya usaha yang dilakukan pelaksana berupa pelaksanaan sekolah lapang merupakan wujud dukungan dari pelaksana. Namun, kurang mencukupi dan kurang memadainya sumber daya manusia maupun sumber daya dana menyebabkan usaha yang dilakukan tersebut tidak dilakukan secara merata terhadap masyarakat sasaran.

Kesadaran berupa dukungan pelaksana mengindikasikan bahwa disposisi pelaksana sudah baik. Selain itu, kurang memadai dan mencukupinya

sumber daya manusia maupun dana mengindikasikan bahwa sumber daya yang ada belum baik. Dengan demikian, usaha yang dilakukan tersebut baik dipengaruhi oleh disposisi berupa dukungan implementor, sedangkan usaha yang dilakukan kurang optimal dan kurang maksimal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya berupa sumber daya manusia dan dana.

4.4 Keadilan

Keadilan berkenaan dengan pelayanan yang diberikan secara adil dan merata terhadap seluruh masyarakat sasaran. Apabila pelayanan terkait pelaksanaan ketersediaan beras berupa sosialisasi dan penyuluhan tersebut tidak diberikan kepada semua sasaran, tentunya akan memberikan hasil yang kurang baik.

Dalam pelaksanaan ketersediaan beras, pelayanan diberikan terhadap kelompok petani yang sudah mengajukan dan terpilih. Adapun kelompok petani yang lain diharapkan bisa mencontoh dan dapat memberikan hasil yang sama. Berdasarkan observasi, kelompok petani yang tidak mendapatkan pelayanan belum memberikan hasil yang maksimal dan berbeda dengan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya struktur birokrasi berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sumber daya berupa manusia dan dana

Terbatasnya sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luas lahan dan banyaknya desa menyebabkan pelayanan tidak mencakup seluruh masyarakat sasaran. Selain itu, alokasi anggaran dana yang tersedia dari Pemerintah Daerah berupa APBD sejumlah 150 juta dinilai masih sangat kecil dalam pelaksanaan

ketersediaan beras. Di sisi lain, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan belum melakukan pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP), sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sasaran tidak memiliki pedoman atau acuan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Adanya sumber daya manusia dan dana yang kurang mencukupi dan memadai mengindikasikan bahwa sumber daya yang ada belum baik, sedangkan tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan ketersediaan beras mengindikasikan bahwa struktur birokrasi yang ada belum baik. Jadi, keadilan dalam pelayanan terkait ketersediaan beras dipengaruhi oleh lemahnya struktur birokrasi berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) dan minimnya sumber daya berupa manusia dan dana.

4.5 Efektifitas

Efektifitas berkaitan dengan pencapaian harapan/ target untuk mencapai tujuan. Apabila realisasi pencapaian terhadap target dapat tercapai, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ketersediaan beras sudah efektif. Sebaliknya, bila realisasi pencapaian terhadap target tidak tercapai maka pelaksanaan ketersediaan beras belum efektif.

Dalam pelaksanaan ketersediaan beras, pencapaian terhadap target yang telah ditentukan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya kendala dilapangan seperti serangan penyakit dan hama, iklim ekstrim, alih fungsi lahan, pola pikir dan pengetahuan masyarakat yang rendah. Tingkat efektifitas yang belum baik tersebut disebabkan oleh sumber daya berupa waktu.

Ketersediaan waktu dalam pelaksanaan ketersediaan beras yaitu satu tahun anggaran dari bulan Januari hingga bulan Desember. Waktu tersebut dinilai belum mencukupi dalam pencapaian terhadap target disebabkan oleh adanya kendala yang belum teratasi.

Adanya sumber daya waktu yang kurang mencukupi dan memadai mengindikasikan bahwa sumber daya yang ada belum baik, sehingga tingkat efektifitas dalam pelaksanaan ketersediaan beras belum baik dipengaruhi oleh lemahnya sumber daya berupa waktu.

4.6 Kecukupan

Kecukupan merupakan tingkat efektifitas dalam memuaskan dan mencukupi kebutuhan konsumsi beras. Ketidakmampuan suatu tingkat efektifitas dalam mencukupi kebutuhan konsumsi beras tentu akan menyebabkan kecukupan kurang baik.

Dalam pelaksanaan ketersediaan beras, tingkat efektifitas/ pencapaian terhadap target selama ini sudah mampu memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat akan beras. Adanya kondisi surplus ketersediaan beras yang terjadi di Kabupaten Batang merupakan indikasi bahwa tingkat efektifitas sudah mencukupi kebutuhan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesadaran berupa dukungan implementor.

Pelayanan yang diberikan terkait pelaksanaan ketersediaan beras kepada masyarakat sasaran berupa sosialisasi dan penyuluhan menyebabkan tingkat efektifitas mampu mencukupi dan memecahkan masalah kebutuhan konsumsi masyarakat. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi yaitu ketersediaan beras yang semakin menurun dan

mengkhawatirkan. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan terjadi terus menerus, maka dikhawatirkan beberapa tahun kedepan akan terjadi kekurangan pangan dan defisit ketersediaan beras.

Adanya kesadaran berupa dukungan implementor yang baik mengindikasikan bahwa disposisi yang ada sudah baik. Jadi, kecukupan hasil pencapaian terhadap target dalam pelaksanaan ketersediaan beras sudah baik dipengaruhi oleh disposisi berupa dukungan dari pelaksana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi ketersediaan beras dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Batang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Kebijakan ketersediaan beras di Kabupaten Batang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menyediakan ketersediaan beras guna memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan penelitian tentang implementasi ketersediaan beras dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Batang, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam pelaksanaan ketersediaan beras di Kabupaten Batang.

Pelaksanaan kebijakan ketersediaan beras secara keseluruhan berkaitan dengan ketepatan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tingkat perubahan masyarakat sasaran kebijakan yang belum sepenuhnya berubah. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya merubah pola pikir dan rendahnya pengetahuan masyarakat sasaran kebijakan. Terkait dengan pengetahuan pelaksana terkait pelaksanaan ketersediaan beras dan

manfaat yang dirasakan sasaran kebijakan sudah baik.

Responsivitas yang dilakukan terhadap tuntutan akan kebutuhan konsumsi beras masyarakat sudah baik. Responsivitas yang diberikan berupa pelayanan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pendampingan terkait program-program kebijakan. Namun yang perlu diperhatikan yaitu kecakupan pelayanan terhadap sasaran kebijakan, semakin banyak sasaran kebijakan yang mendapatkan pelayanan tentunya akan semakin memberikan hasil yang maksimal.

Dalam hal efisiensi, implementasi kebijakan ketersediaan beras belum baik dan belum tercapai sebuah efisiensi. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan sarana prasarana yang belum tercukupi dan memadai. Adanya ketidakseimbangan yang terjadi antara ketersediaan sarana prasarana dengan lahan pertanian dan jumlah kelompok tani di Kabupaten Batang menyebabkan belum tercukupinya sarana prasarana. Selain itu ketidakmerataan sarana prasarana yang dimiliki oleh kelompok tani yang satu dengan lainnya menyebabkan ketersediaannya belum memadai. Begitupula dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan suatu tingkat efektifitas juga belum dilakukan secara optimal. Usaha-usaha yang berupa program SL PTT, SL PHT dan SRI tersebut hanya dilakukan kepada beberapa kelompok yang sudah mengajukan dan membutuhkan.

Berkenaan dengan usaha yang dilakukan, tentunya berkaitan dengan keadilan pelayanan kebijakan. Pelayanan kebijakan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya dilakukan secara merata. Pelayanan kebijakan berupa sosialisasi, penyuluhan,

pelatihan maupun pendampingan terkait program kebijakan yang dilakukan hanya kepada beberapa kelompok.

Dalam realisasi pencapaian target, pelaksanaan kebijakan ketersediaan beras belum baik dan belum tercapai sebuah efektifitas. Realisasi pencapaian target selama tahun 2009-2013 belum pernah tercapai sesuai target. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala yang dihadapi di lapangan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi di lapangan yakni adanya bencana alam, alih fungsi lahan, serangan hama dan penyakit, sulitnya merubah pola pikir masyarakat kebijakan dan rendahnya pengetahuan. Tentunya kendala tersebut menghambat dalam realisasi pencapaian target.

Berkaitan dengan kecukupan dari tingkat efektifitas dalam memecahkan masalah kebutuhan konsumsi sudah dapat dikatakan baik. Hal ini diindikasikan dengan adanya keadaan surplus yang dialami Kabupaten Batang, sehingga tentunya dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sudah dapat terpecahkan. Namun hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi yaitu semakin turunnya ketersediaan beras di Kabupaten Batang yang dikhawatirkan akan terjadi kekurangan pangan dan defisit ketersediaan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka rekomendasi untuk implementasi ketersediaan beras dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Batang yaitu :

1. Sosialisasi dan penyuluhan secara intensif kepada kelompok tani terkait pelaksanaan ketersediaan beras.

2. Perlu penambahan dan pengaturan pemerataan sarana prasarana dengan memperhatikan sebaran dan jumlah kelompok tani.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melakukan pemerataan program peningkatan produksi berupa SL PTT, SL PHT dan SRI terhadap kelompok tani.
4. Pelayanan terhadap kelompok tani berupa sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pembinaan maupun pendampingan tidak hanya dilakukan kepada beberapa kelompok tani saja, namun harus dilakukan kepada seluruh sasaran kebijakan.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap kelompok tani selama proses produksi padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2010. Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1990, 1995, 2000, 2010. Dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/vi-ew.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1. Diunduh pada 12 Maret 2014 pukul 14.22 WIB.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kapindo, Ridwan Kurniawan. 2011. Analisis Pengaruh Subsidi Pupuk, Kredit Pangan Dan Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur Ketahanan Pangan

Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas
Diponegoro.

Prastowo, Andi. 2012. *Metode
Penelitian Kualitatif, Perspektif
Rancangan Penelitian*.
Yogyakarta: AR-RUZZ Media.

Purwanto, Erwan Agus dan
Sulistiyastuti, Dyah Ratih. 2012.
Implementasi Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Gava Media.
Subarsono. 2008. *Analisis
Kebijakan Publik*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Sudirja, Rija. 2008. *Mewujudkan
Kedaulatan Pangan Melalui
Kebijakan Pengelolaan Lahan
Pertanian Pangan*. Disampaikan
Seminar Regional Musyawarah
Kerja BEM Ilmu Tanah
Indonesia Wilayah II (29 Januari
2008). Bandung.

Bagian Hukum. *Batang Dalam Angka
2013*. Setda Kabupaten Batang.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
2002 tentang Ketahanan Pangan